

## Mengurai Kompleksitas Persoalan Buruh Migran

Oleh Pungky Desy Christanti<sup>1</sup>

SEKAR (diperankan Titi Sjuman), dalam film *Minggu Pagi di Victoria Park*, pergi ke Hongkong untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Seperti banyak TKW lain, kepergian Sekar bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagi diri sendiri dan keluarganya. Tapi sepertinya tujuan itu hendak dicapai dan ditunjukkan Sekar dengan segera. Di awal masa kerjanya ia mulai mengirim uang dalam jumlah signifikan pada orangtuanya. Menerima kiriman uang dari anaknya, ayah Sekar senang dan bangga. Uang kiriman dari anaknya digunakan ayah Sekar untuk memperbaiki rumah, mengredit motor, dan membeli ternak.

Tapi kesenangan dan kebanggaan Ayah Sekar berkebalikan dengan nasib Sekar. Untuk bisa mengirimkan uang ke orang tuanya dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, Sekar nekad meminjam uang pada *Supercredit*, sebuah lembaga keuangan yang biasa memberi pinjaman kepada para buruh migran dengan bunga pinjaman relatif besar. Hal ini dilakukan Sekar karena sebenarnya penghasilannya waktu itu tidak cukup jika sebagiannya dialokasikan untuk dikirim pada orang tuanya. Penghasilan Sekar saat itu kira-kira baru cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Tapi Sekar tidak menceritakan masalah itu pada orang tuanya. Ia terus memaksakan diri untuk mengirimkan uang pada orang tuanya sekaligus bekerja keras untuk menyicil utang pada *Supercredit*. Demi itu ia rela melakukan pekerjaan apapun; dari tukang cuci piring, perawat orang jompo, sampai menjadi pekerja seks komersial (PSK). Masalah yang dihadapi Sekar kian pelik karena passportnya dijadikan jaminan untuk bisa meminjam pada *Supercredit*.

\*\*\*

Dr. Indraswari, dosen FISIP Universitas Parahyangan (UNPAR), yang menjadi narasumber dalam acara pemutaran dan diskusi film *Minggu Pagi di Victoria Park* yang diselenggarakan perpustakaan AKATIGA (23/8/2011), menjelaskan, ada dua aspek utama yang yang mesti

---

<sup>1</sup> Lulusan Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan dan Peneliti Akatiga

diperhatikan dalam persoalan buruh migran. Satu, perlakuan dan perlindungan buruh migran di Indonesia. Dua, perlakuan dan perlindungan yang diterima buruh migran di negara tujuan.

### **Kepedulian Pemerintah Indonesia**

Sejak tahun 1975 pemerintah Indonesia mulai mengirimkan warganya untuk menjadi pekerja di berbagai negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Hongkong dan Singapura. Dari tahun ke tahun jumlah buruh migran yang dikirim terus meningkat. Hingga kini (2011) tercatat enam juta buruh migran Indonesia yang bekerja di berbagai negara. Angka itu belum ditambah dengan buruh migran ilegal yang tidak sedikit jumlahnya. “Pemerintah tidak memiliki data pasti berapa besarnya jumlah buruh migran. Angka enam juta tersebut sejak tahun 2005 sampai sekarang tidak ada perubahan, dan mungkin saja masih ada enam juta buruh migran lainnya yang tidak tercatat.” Demikian kata Indrasari Tjandraningsih, peneliti AKATIGA bidang perburuhan, yang menjadi salah satu peserta dalam diskusi dan pemutaran film itu.

Ti adanya data valid itu adalah salah satu indikasi minimnya kepedulian pemerintah Indonesia terhadap buruh migran. Pemerintah hanya menganggap buruh migran komoditi yang memberikan pemasukan besar bagi Negara. Setiap tahunnya buruh-buruh migran itu mengisi kas negara sebesar 6,6 triliun atau setara 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah itu merupakan sumbangan devisa terbesar kedua setelah Migas.

Indikasi lain minimnya kepedulian pemerintah adalah kurangnya pembekalan kemampuan dan keterampilan orang-orang yang akan dikirim sebagai buruh migran. Menurut Indraswari, selama ini pemerintah hanya mempersiapkan pelatihan teknis seperti pemakaian mesin cuci, *microwave*, tetapi pemerintah tidak pernah mengajari calon buruh migran mengenai budaya Negara tujuan. Karenanya, banyak ditemukan penyiksaan TKW yang bekerja sebagai pembantu disebabkan kesalahpahaman antara dia dan majikannya.

Pada pasal 3 poin B Undang-Undang No 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, tertera bahwa perlindungan buruh migran mencakup perlindungan buruh migran sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali lagi ke Indonesia. Tetapi, seperti halnya masalah-masalah kebijakan di Indonesia lainnya, pemerintah sering lemah dalam implementasi. Nyatanya, pemerintah masih belum mampu mengantisipasi dan mengatasi bermacam masalah seperti penyiksaan, tidak dibayarnya gaji, dan masalah lain

yang kerap dihadapi buruh migran. Dalam pasal 5 dan 6 disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan perlindungan TKI. Akan tetapi, kata Indraswari, “upaya diplomatik seperti apa yang dilakukan pemerintah untuk perlindungan buruh migran di negara tujuan?”

Bukan hanya ketika akan berangkat dan ketika berada di negara tujuan, ketika kembali ke tanah air pun buruh migran kembali dihadapkan pada masalah lain. Tentang ini Indraswari bercerita ketika suatu hari ia bertemu dengan buruh migran di terminal kedatangan salah satu bandara di Indonesia. “Ada TKW yang minta tolong ke saya, dia bilang, ‘bu bilang saja saya saudara ibu, kalau nggak nanti saya dibawa ke terminal itu, nanti saya diperas.’”. Ironi lagi.

### **Perlindungan di Negara Tujuan**

Hongkong sebagai salah satu negara tujuan buruh migran memiliki aturan yang tegas dan jelas untuk melindungi buruh migran. Pemerintah Hongkong punya kebijakan yang mengatur hubungan majikan dan pekerjanya. Majikan tidak boleh menyentuh apalagi menyiksa buruh migran yang bekerja padanya. Jika majikan melanggar aturan itu, buruh bisa melaporkannya pada pihak berwenang dan majikan akan diberi sanksi. Kebijakan itu cukup efektif mencegah terjadinya kekerasan terhadap buruh migran.

Film *Minggu Pagi di Victoria Park* memperlihatkan bagaimana pemerintah Hongkong peduli terhadap hak-hak buruh migran. Pemerintah Hongkong memberikan keleluasaan dan menyediakan ruang terbuka dimana buruh migran bisa berkumpul dan bersosialisasi seperti warga pada umumnya. Pemerintah Hongkong memperlakukan buruh migran seperti pekerja lainnya. Dalam seminggu kerja, buruh migran mendapatkan libur di hari minggu. Para buruh migran dari Indonesia, seperti digambarkan dalam film *Minggu Pagi di Victoria Park*, memanfaatkan hari libur itu untuk berkumpul dan bercengkrama di taman Victoria (*Victoria Park*). Selain tempat melepas penat, *Victoria Park* menjadi tempat buruh migran berbagi cerita tentang pengalaman dan masalah yang dialaminya selama sepekan.

Tidak semua negara tujuan buruh migran memperlakukan buruh migran dengan baik seperti Hongkong. Setiap negara memiliki kebijakan terhadap buruh migran yang relatif berbeda satu sama lain. Karenanya, konteks negara di mana buruh migran bekerja sangat mempengaruhi jaminan dan perlindungan hukum seperti apa yang diterima oleh buruh migran. Contohnya di

Saudi Arabia, dengan diberlakukannya hukum yang ketat dan timpang, buruh migran di sana tidak mungkin bisa berkumpul dan bersosialisasi di ruang terbuka seperti yang terjadi di Hongkong. Itulah mengapa pembekalan pengetahuan tentang watak budaya negara tujuan penting diberikan kepada para calon buruh migran. Dan yang tak kalah penting, dalam penanganan pelbagai persoalan yang menimpa buruh migran, pemerintah perlu menggunakan strategi diplomatik yang berbeda bagi setiap negara yang budaya dan tipe pemerintahannya juga berbeda satu sama lain.[]